

PERAN BHABINKAMTIBMAS DAN KARANG TARUNA DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI RABIES DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

drh. Nur Hidayatullah¹, drh. Ernawati²

Medik Veteriner Muda ¹Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, ²Direktorat Kesehatan Hewan
drhdayat123@gmail.com, ernawati_rahmatsyah@yahoo.com

ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bebas dari rabies pada Agustus 2014. Namun pada akhir tahun 2014 ditemukan kembali kasus *lyssa* di Kabupaten Ketapang. Hingga saat ini dilaporkan bahwa kasus rabies ditemukan telah pada 11 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah yang masih belum ditemukan kasus positif baik pada manusia maupun hewan adalah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak dan Singkawang.

Cepatnya penyebaran rabies merupakan imbas dari kondisi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah sekitar 147.307 km² (lebih luas dari Pulau Jawa), populasi HPR berpemilik yang dilirikkan \pm 190.000 ekor, sedangkan jumlah vaksinator yang sangat terbatas, maka berdampak pada rendahnya cakupan vaksinasi dan kekebalan kelompok yang terbentuk.

Sejak tahun 2017, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI melakukan sebuah terobosan baru dengan melakukan pelatihan terhadap 180 orang yang terdiri dari anggota Bhabinkamtibmas dan Karang Taruna. Untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyakit rabies, mereka berperan sebagai kader rabies dengan tugas utama melakukan pendataan HPR, vaksinasi dan sosialisasi di masing-masing wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dan sosialisasi terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau.

Pelatihan dilaksanakan menggunakan metode partisipatif dengan materi tentang pengetahuan dasar rabies, pencegahan dan penanganannya. Selain itu, dilakukan praktek vaksinasi ke lapangan dengan tujuan untuk implementasi materi yang disampaikan, simulasi pelaksanaan vaksinasi serta membantu peningkatan cakupan vaksinasi di lokasi praktek.

Dengan penambahan jumlah petugas melalui kader vaksinator tersebut berdampak pada meningkatnya cakupan vaksinasi rabies di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2016 jumlah realisasi vaksinasi rabies mencakup 45.896 dari 184.950 ekor populasi HPR (24,8%). Sedangkan pada tahun 2017 setelah adanya penambahan kader vaksinator rabies, jumlah vaksinasi HPR mencakup 81.970 dari 188.518 ekor (43,4%). Melihat terobosan tersebut berdampak signifikan terhadap cakupan vaksinasi di Kalimantan Barat, program ini akan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Kata kunci : vaksinasi rabies, kader vaksinator, sumber daya manusia, peningkatan cakupan vaksinasi rabies, rabies kalbar

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki luas sekitar 146.807 km², dengan predikat sebagai provinsi dengan wilayah terluas peringkat ke 4 di Indonesia setelah Irian Jaya (421.891 km²), Kalimantan Timur (202.440 km²) dan Kalimantan Tengah (152.600 km²). Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai akses jalan darat keluar negeri, karena mempunyai akses sepanjang 400 km dari pontianak ke Sarawak, Malaysia.

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah, dibagian barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Sedangkan di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat terdapat 4 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak-Malaysia yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.

Pada tahun 2005 yang lalu, ditemukan 1 kasus positif rabies di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan 1 orang korban pada manusia. Untuk menanggulangi dan mencegah perluasan wilayah kasus, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta instansi terkait lainnya melakukan langkah-langkah pemberantasan diantaranya adalah vaksinasi di wilayah tertular dan surveilans. Dari surveilans yang dilakukan, didapatkan data bahwa tidak ditemukan kasus rabies lain di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mendorong untuk melakukan surveilans pembebasan yang dikoordinir oleh Balai Veteriner Banjarbaru, yang hasilnya dapat menjadi rekomendasi penetapan wilayah bebas rabies oleh Menteri Pertanian.

Pada tahun 2014 yang lalu merupakan momen yang sangat bersejarah bagi Provinsi Kalimantan Barat terkait status rabies di wilayah ini. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014, wilayah ini mendapatkan pernyataan bebas rabies dari Kementerian Pertanian namun tertular kembali setelah ditemukan kasus positif rabies baik pada manusia (*lyssa*) dan hewan.

Ditemukan pola penyebaran kasus rabies yang sangat berbeda dengan kasus rabies yang lalu. Pada kasus yang terjadi di tahun 2005, rabies hanya ditemukan di Kabupaten Ketapang. Sedangkan pada saat tertular kembali pada 2014 hingga maret 2018 ini, rabies telah ditemukan di seluruh wilayah Kabupaten Kota se Provinsi Kalimantan Barat, kecuali Kota Pontianak.

Penyebaran rabies yang cepat ini membuat pihak yang menangani bidang kesehatan maupun kesehatan hewan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bekerja ekstra keras untuk menekan kasus baik pada hewan penular rabies (HPR) maupun pada manusia.

Dengan populasi HPR lebih dari 190.000 ekor yang tersebar di 14 wilayah Kabupaten/Kota dengan luas wilayah setara dengan luas Pulau Jawa, Madura dan Bali tentunya merupakan catatan tersendiri bagi pelaksanaan program penanggulangan rabies. Terlebih hampir semua HPR dipelihara dengan cara diliarikan pada kondisi medan yang berat di sebagian wilayah.

Sesuai pedoman pengendalian rabies yang ditetapkan, faktor utama yang diperlukan adalah pelaksanaan vaksinasi dengan cakupan lebih dari 70% dari populasi HPR untuk mendapatkan kekebalan terhadap rabies pada kelompok HPR di wilayah endemis. Untuk melaksanakan program ini

dibutuhkan vaksin beserta fasilitas penunjangnya serta petugas pelaksana yang cukup.

Selama tahun 2017 stok vaksin pada Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 40,4% dari populasi HPR yang ada. Salah satu alasan masih kurangnya vaksin yang tersedia adalah masih kurangnya jumlah vaksinator rabies di Kalimantan Barat.

Sampai dengan tahun 2017 tercatat sebanyak 185 orang yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi rabies di 14 kabupaten/kota. Personil yang terlibat dalam vaksinasi rabies antara lain adalah dokter hewan, paramedik veteriner dan PPL. Berdasarkan luas wilayah dibandingkan dengan populasi anjing diatas 190.000 ekor, dapat diasumsikan bahwa 1 orang vaksinator rabies harus melakukan vaksinasi terhadap 1.027 ekor anjing (belum termasuk HPR lainnya) dengan masing-masing wilayah kerja 796 Km² (setara dengan luas kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah).

TUJUAN

Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kader rabies dalam penanggulangan rabies di Kalimantan Barat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Karang Taruna bertujuan untuk:

1. Menambah jumlah petugas vaksinasi rabies
2. Meningkatkan jangkauan wilayah vaksinasi & kekebalan kelompok pada populasi HPR
3. Percepatan dalam melaksanakan vaksinasi rabies
4. Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi
5. Meningkatkan sensitifitas surveilans melalui pelaporan kasus yang ditemukan.

MATERI DAN METODA

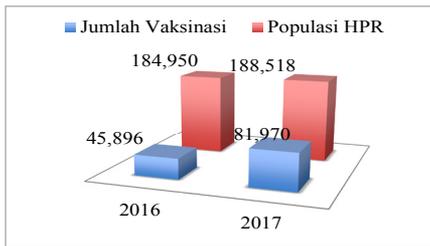
Sebelum melakukan perekrutan kader rabies terlebih dahulu diidentifikasi lokasi-lokasi yang menjadi prioritas, yaitu desa yang berstatus tertular dan selama ini sulit dijangkau petugas. Kader yang dipilih adalah anggota Bhabinkamtibmas dan Karang Taruna, sehingga masing-masing kader akan memiliki wilayah kerja di lingkungan tempat tinggal/bertugas.

Setelah menentukan lokasi prioritas, dilakukan seleksi calon kader berdasarkan usulan Polres masing-masing kabupaten bagi Bhabinkamtibmas dan Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan kabupaten/kota bagi anggota Karang Taruna. Kader yang terpilih selanjutnya akan diberikan pelatihan terkait penanggulangan rabies dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

HASIL

Dengan adanya penambahan kader rabies di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 180 orang yang mulai bertugas pada bulan September 2017, memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan cakupan vaksinasi tahun 2017.

Pada tahun 2016 jumlah realisasi vaksinasi HPR di Kalimantan Barat sebanyak 45.896 ekor dari 184.950 ekor populasi HPR (cakupan vaksinasi sebesar 24,8%). Pada tahun 2017 setelah adanya penambahan kader rabies, jumlah realisasi vaksinasi HPR menjadi 81.970 ekor dari 188.518 ekor (cakupan vaksinasi sebesar 43,4 %).



Walaupun didapatkan peningkatan cakupan vaksinasi pada tahun 2017 belum menggambarkan hasil optimal penambahan kader dikarenakan penugasan yang dilakukan dan ketersediaan vaksin untuk pelaksanaan kegiatan terealisasi sejak bulan September 2017

Grafik 1. Cakupan vaksinasi HPR tahun 2016 dan 2017

PEMBAHASAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan rabies di Provinsi Kalimantan Barat diperlukan penambahan petugas yang menangani untuk dapat mengimbangi luasnya wilayah. Pada umumnya, pada 14 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih kekurangan tenaga yang menangani kesehatan hewan baik itu medik ataupun paramedik veteriner.

Dengan adanya kerja sama antara Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat maka untuk menanggulangi masalah diatas, direkomendasikan bahwa petugas Bhabinkamtibmas dapat menjadi kader rabies di daerah prioritas. Rekomendasi ini dikarenakan beberapa alasan antara lain: masing masing petugas bertanggung jawab akan keamanan dan kenyamanan di masing-masing wilayah kerjanya, petugas pada umumnya dekat dan menjadi panutan masyarakat, meminimalkan penolakan vaksinasi pada sebagian masyarakat.

Selain perekrutan petugas Bhabinkamtibmas dilakukan juga pemberdayaan terhadap anggota Karang Taruna dan Penyuluh Pertanian di daerah prioritas. Keterlibatan Karang Taruna merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya pemberantasan penyakit rabies di Kalimantan Barat.

Petugas yang terpilih sebagai kader rabies pada tahun 2017 sebanyak 180 orang yang terdiri dari 54 orang petugas Bhabinkamtibmas, 80 orang anggota Karang Taruna dan 46 orang dari Penyuluh Pertanian. Kader rabies ini diberikan pelatihan dengan materi berupa teori dan praktek mengenai pengetahuan tentang rabies, hewan penular rabies, vaksinasi, manajemen rantai dingin vaksin, komunikasi, tata laksana kasus gigitan terpadu (TAKGIT).

Setelah mendapatkan teori di dalam ruangan, para kader rabies melakukan praktek vaksinasi di lokasi lokasi pelatihan. Sebagai fasilitator dalam pelatihan kader rabies ini melibatkan *Master Trainer* Rabies tingkat nasional dari provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Kementerian Pertanian RI.

Pelatihan dilaksanakan di 5 Kabupaten dengan pembagian peserta sebagai berikut:

1. Kabupaten Sanggau diikuti 40 peserta dari Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang
2. Kabupaten Kayong Utara diikuti 30 peserta dari Kabupaten Kayong Utara
3. Kabupaten Kubu Raya diikuti 30 peserta dari Kabupaten Kubu Raya dan Melawi
4. Kabupaten Bengkayang diikuti 40 peserta dari Kabupaten Bengkayang dan Sambas
5. Kabupaten Mempawah diikuti oleh 40 peserta dari Kabupaten Bengkayang, Sambas dan Kota Singkawang.



Kegiatan praktek vaksinasi peserta pelatihan (Foto: drh. Ernawati dan Ely Marini K., S.Pt.)

Setelah melaksanakan pelatihan, seluruh peserta akan diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) yang didapatkan di Puskesmas setempat. Tugas pertama untuk para kader rabies setelah mendapatkan pengebalan adalah melakukan pendataan populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di wilayah masing-masing dan sosialisasi terkait akan dilaksanakannya vaksinasi massal. Hasil pendataan HPR yang didapatkan tersebut akan dilaporkan ke Dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/kota dan Provinsi. Data inilah yang akan digunakan sebagai dasar target pelaksanaan vaksinasi sehingga cakupan vaksinasi dapat tercapai secara maksimal. Selain itu dengan data tersebut kebutuhan vaksin serta bahan penunjang lainnya dapat tersedia saat pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penambahan kader rabies di Provinsi Kalimantan Barat dapat membantu dalam peningkatan cakupan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Perlunya penetapan strategi, komitmen dan dukungan dari banyak pihak untuk keberlanjutan program kader rabies (termasuk persiapan anggaran yang dibutuhkan).
3. Perlunya penyusunan jadwal dan target sebagai acuan perencanaan kerja kader rabies serta evaluasi hasilnya.
4. Perlunya pengaturan logistik vaksinasi terutama terkait manajemen rantai dingin vaksin.
5. Perlunya mentoring dan monitoring kader saat pelaksanaan.
6. Perlunya dilakukan *refresher training* terhadap kader rabies.

DAFTAR PUSTAKA

- Jackson, A.C., 2000. Rabies. Canadian journal of neurological sciences 27. 278-282
- Nadin-Davis, S.A. Huang, W. Armstrong, J., Casey, G.A, Bahloul, C, Tordo, N Wandeler, A.I., 2001. Antigenic and genetic divergence of rabies viruses from bat species indigenous to Canada.
- Steele, J. H. and Fernandez, P.J., 1991. History of rabies and global aspect. In- Baer, G.M. [ed] The natural history of rabies, 2nd ed.CRC, Boca Raton Florida. USA
- World Health Organisation, 1996. Laboratory Techniques in Rabies, Fourth Edition, Meslin F.-X., Kaplan M.M & Koprowski H., eds. WHO, Geneva, Switzerland.